

PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) (STUDI PERBANDINGAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DENGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN) PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011-2013

Oleh :

Elsha Dwi Mutia

Email : elshadwi92@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Immaculacy and Landscaping Official of Pekanbaru City is unity viewing direction, comprehension and implimitation of development hygiene sector, landscape gardening, greening, street lighting, and decorative lighting having vision that realize Pekanbaru City is cleanest, greening, beautiful and sparkling in Indonesia. Fire Brigade Official Pekanbaru City is govenrmental organizations having main task and fuction that is aid the Pekanbaru's Mayor for implementing regional authority in prevention sector and fire prevention. Health and Safety Working is one of labor protection aspects for can improve the labor's quality in Immaculacy and Landscaping Official with Fire Brigade Official Pekanbaru City.

The purpose of this research is to know how the management of health and safety working in Immaculacy and Landscaping Official with Fire Brigade Official Pekanbaru City in 2011-2013 and to know any efforts conducted the increase health and safety working that the work accident can be minimized. The study uses descriptive qualitative research methods that describe and interpret the data. Informant in this research are 7 people where researchers already understand the preliminary information about research object and informant research.

The result of this study that management of health and safety working in comparison between Immaculacy and Landscaping Official with Fire Brigade Official Pekanbaru City have advantages and disadvantages on Planning, Organizing, Directing, and Controlling of Healthy and Safety Working, where the planning in management of healthy and safety working on Immaculacy and Landscaping Official better than Fire Brigade Official. On organizing of health and safety working in both official is equality having good organizing, whereas on directing and controlling of health and safety working, Fire Brigade Official gives better results than Immaculacy and Landscaping Official. Efforts were made in minimazing work accidents by Immaculacy and Landscaping Official with Fire Brigade Official Pekanbaru City is good enough, it's more give warning and direction and then provide personal protective equipments to workers in the areas and in the Fire Brigade Official training is becoming more routine.

Pendahuluan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dalam suatu perusahaan/instansi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Republik Indonesia, karena tenaga kerja merupakan motor penggerak bagi perusahaan/instansi, partner kerja, asset dan investasi bagi perusahaan/instansi dalam meningkatkan produktivitas kerja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 86 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Seerti halnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang pelayanan, penempatan, dan perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Beberapa instansi pemerintah di Kota Pekanbaru seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran, dimana tenaga kerjanya ada yang melakukan kegiatan rutinitas pekerjaan di lapangan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan penataan pertamanan sering terjadi kecelakaan kerja sehingga mengurangi keefektifan produktivitas tenaga kerja. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru yang juga mempunyai resiko kecelakaan kerja yang tinggi, dimana petugas pemadam kebakaran setiap kali menanggapi kasus kebakaran di Kota Pekanbaru sering mengalami cedera atau kecelakaan kerja. Dalam hal ini harus dilihat kembali bagaimana pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan perbandingannya dari kedua instansi tersebut (dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen) serta usaha-usaha apa yang telah dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Pekanbaru yaitu di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan judul “Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) (Studi Perbandingan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dengan Dinas Pemadam Kebakaran) Pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas

- Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dalam peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar kecelakaan kerja dilapangan dapat diminimalisir?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013
- b. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru dalam peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja agar kecelakaan kerja dilapangan dapat diminimalisir?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan.
 - b. Sebagai masukan dan bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

- c. Dapat dipergunakan untuk menambah khasanah perpustakaan.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi instansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kondisi keselamatan tenaga kerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hal ketenagakerjaan, khususnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.
 - c. Sebagai sumbangan data bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

Kerangka Teori

Inu Kencana Syafie menyatakan bahwa manajemen baru merupakan suatu masalah yang besar setelah faktor dan sumber daya yang paling sukar untuk dikendalikan dan didayagunakan, masuk ke dalam kancah karya, yaitu manusia. Oleh karena itu manajemen menekankan pada pengendalian dan pendayagunaan manusia itu sendiri. Dengan begitu pada manajemen tampak bahwa organisasi cenderung relatif lebih dibutuhkan.

Rahardjo Adisasmita menyatakan bahwa mempelajari manajemen harus pula mempelajari fungsi-fungsi manajemen, dari sejumlah fungsi manajemen terdapat empat fungsi yang paling banyak disebut yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), directing (pelaksanaan), controlling (pengawasan). Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa Manajemen Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien dimaksudkan sebagai manajemen yang mampu menyelesaikan tugas pemerintahan daerah secara cepat (dalam waktu singkat), ringkas tidak berbelit-belit (tidak lagi melalui banyak meja), berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan atau keborosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Menurut **International Labor Organization- ILO (1989)** terdapat tiga faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu:

1. Faktor peralatan teknis.
2. Faktor lingkungan kerja.
3. Faktor manusia

Menurut Dharma Bumi, usaha-usaha peningkatan keselamatan kerja itu adalah :

1. Pengawasan.
2. Pelatihan/training.
3. Promosi.
4. Pemberian penghargaan keselamatan kerja (safety award).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013

a) Perencanaan (Planning)

Perencanaan K3 dilakukan dengan 2 tahap :

1. Diadakannya kebijakan K3, yang mana isi kebijakan tersebut memuat komitmen dan dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3 dan harus diberitahukan kepada seluruh pekerja dan digunakan sebagai landasan kebijakan.
2. Administratif dan prosedur :
 - ✓ Menetapkan personal dan petugas yang menangani K3.
 - ✓ Menetapkan prosedur dan sistem kerja K3 selama pekerjaan berlangsung termasuk tugas dan wewenang semua unsur.
 - ✓ Sebelum memulai pekerjaan dilakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan, yang dilakukan bersama pengawas.

b) Pengorganisasian (Organizing)

Untuk mewujudkan pengorganisasian dalam perencanaan yang telah dibuat maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru melakukan beberapa pembagian tugas dan wewenang :

1. Kepala Bidang Kebersihan Kota : Mengawasi kinerja masing-masing seksi dalam pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan : Mengawasi

setiap kinerja pengawas lapangan

3. Pengawas PNS : Memeriksa hasil laporan bulanan dari mandor dan mengolah data tersebut
4. Mandor : Mengawasi kinerja pekerja harian lepas
5. THL : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing

c) Pelaksanaan (Directing)

Di dalam pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu meliputi pemberian arahan dari pemimpin kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan keselamatan didalam bekerja. Sedangkan kegiatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja dilapangan dilakukan oleh seorang mandor.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga merangsang para anggotanya baik itu pengawas, mandor, maupun pegawai harian lepas (PHL) untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Maka dari itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan keamanan keselamatan kerja bagi para pengelola dari setiap gangguan yang mengganggu aktifitas kerja seperti dengan melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan atau Satuan Lalu Lintas di Polsek terdekat untuk

mengatur lalu lintas pada saat ada pekerjaan membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang berada di jalan raya dan sebagainya dan memberikan asuransi berupa JAMSOSTEK.

d) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam keselamatan kerja para pekerja dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan di Kota Pekanbaru meliputi pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja pekerja harian lepas (PHL). Pengawasan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengawasan langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan operasi rutin untuk melihat kinerja pegawai harian, yaitu mandor yang langsung turun ke lapangan.

Sementara pengawasan tidak langsung pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan meminta konfirmasi dari pengawas dan mandor yang ada dilapangan, yang mana Pengawas PNS bertugas memeriksa dan mengolah hasil laporan bulanan dari mandor yang diketahui oleh Kepala Seksi.

2. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru

hanya dengan berdasarkan SOP dinas tersebut yang mana beberapa isi dari SOP tersebut menyebutkan yaitu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan, memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja dan memberi pertolongan pada kecelakaan. Karena itu perencanaan K3 nya belumlah secara maksimal dapat berjalan, hal ini dipengaruhi kondisi dilapangan yang memiliki resiko kecelakaan kerja tinggi sehingga prosedur didalam keselamatan dan kesehatan kerja bisa berubah-ubah demi menghindari kecelakaan kerja yang fatal, serta banyaknya faktor non teknis yang membuat Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi terkendala.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Untuk mewujudkan pengorganisasian dalam perencanaan yang telah dibuat maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru melakukan beberapa pembagian tugas dan wewenang :

1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran : Mengawasi kinerja masing-masing seksi dalam pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja serta memeriksa laporan bulanan.
2. Kepala Sub Bidang Operasional : Mengawasi kinerja Komandan Regu Fire Fighter dalam

memberikan arahan kepada bawahan

3. Komandan Regu fire fighter : Mengawasi kegiatan pemadaman kebakaran dan juga sebagai penyelamat dan operasional pemadam kebakaran serta membuat laporan bulanan.
4. Anggota Pemadam Kebakaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing

c. Pelaksanaan (Directing)

Di dalam pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pemadam Kebakaran meliputi pemberian arahan dari pemimpin kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan keselamatan didalam bekerja, serta diberikan berbagai pelatihan kepada Komandan Regu Fire Fighter dan anggota pemadam kebakaran untuk memberikan hasil maksimal dalam kegiatan pemadaman kebakaran karena pelaksanaan kegiatan langsung dilapangan dilakukan oleh Komandan Regu Fire Fighter dan anggota pemadam kebakaran. Pada fungsi *directing*, Dinas Pemadam Kebakaran merangsang para anggotanya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Maka dari itu, Dinas Pemadam Kebakaran memberikan asuransi jiwa berupa Jasa Raharja kepada seluruh petugas pemadam kebakaran serta memberikan

uang santunan apabila terjadi kecelakaan kerja.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan dalam keselamatan kerja para pekerja dalam pengelolaan kebakaran di Kota Pekanbaru meliputi pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja para petugas pemadam kebakaran. Pengawasan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengawasan langsung pihak Dinas Pemadam Kebakaran turun langsung ke tempat kejadian dan melihat bagaimana para petugas bekerja dan menerapkan prosedur keselamatan kerja yang mereka pahami. Sementara pengawasan tidak langsung Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran meminta konfirmasi dari pengawas yaitu Komandan Regu fire fighter berupa laporan bulanan.

3. Perbandingan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013

Setelah melakukan analisa data dan wawancara pada kedua dinas tersebut, dapat dilihat bahwa perencanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih baik dibanding dengan perencanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di Dinas Pemadam Kebakaran, hal itu dikarenakan perencanaan pengelolaan K3 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan menerapkan alur kerja

yang jelas dan lebih terkoordinasi, dapat dilihat pada dua tahap perencanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Kebersihan dan pertamanan yaitu diadakannya kebijakan K3 serta administratif dan prosedur. Sedangkan di Dinas Pemadam Kebakaran perencanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja telah ditetapkan dalam SOP Dinas namun kadang kala bisa berubah dikarenakan faktor kondisi lapangan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat saat memadamkan api.

Pada pengorganisasian pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di kedua dinas tersebut sama-sama memiliki pengorganisasian yang bagus karena sudah memiliki tingkatan tugas dan wewenang masing-masing pelaksana pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, Dinas Pemadam Kebakaran memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, itu dapat dilihat bahwasanya pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di Dinas Pemadam Kebakaran lebih memahami prosedur yang ada dikarenakan mereka diberikan pelatihan khusus saat melakukan tugasnya dalam memadamkan kebakaran, sedangkan para pekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak diadakan pelatihan.

Dan pada pengawasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja Kepala Bidang serta Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran turun langsung ke lapangan untuk mengawasi anggota dalam memadamkan api, sedangkan Kepala Bidang Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan melainkan hanya memeriksa laporan

bulanan hasil kegiatan para pekerja karena pengawas di lapangan dilakukan oleh seorang mandor yang telah ditunjuk oleh Kepala Bidang

4. Usaha-Usaha dalam Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru :

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu para pengawas senantiasa selalu memberikan peringatan dan arahan kepada setiap para pekerja, tenaga kerja juga diberikan alat perlindungan diri seperti spotlite, baju rompi (menyala saat malam) dan traffic cone.

- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru :

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu adanya pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang lebih rutin terkait memadamkan kebakaran agar dapat mengurangi angka kecelakaan kerja yang terjadi kepada para petugas pemadam kebakaran, selain itu para petugas juga diberikan alat perlindungan diri yang lengkap agar dapat digunakan pada saat petugas menangani kebakaran meliputi radio HT, fire jacket, fire safety boots, fire helmet, fire gloves, kampak pinggang, senter kepala dan masker.

Kesimpulan

1. Perencanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih baik dibanding dengan Dinas Pemadam Kebakaran, pada pengorganisasian pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dikedua dinas tersebut sama-sama memiliki pengorganisasian yang baik, sedangkan pada pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, Dinas Pemadam Kebakaran memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun secara keseluruhan untuk pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dikedua dinas tersebut sudah berjalan cukup optimal.

2. Usaha-usaha yang dilakukan dalam meminimalisir kecelakaan kerja oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik yaitu lebih banyak memberikan peringatan dan arahan serta memberikan alat perlindungan diri yang lengkap pada para pekerja dilapangan dan pada Dinas Pemadam Kebakaran pelatihan-pelatihan dilakukan lebih rutin.

Daftar Pustaka

1. Buku :

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dharma, Bumi. 2001. *Jaminan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Bandung:

Labor Education Center.

- Dessler, Gary. 1993. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghallia Indonesia.
- Elaine L. Chao and John L. Henshaw, U.S. Department of Labor, *Hand and Power Tools, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 3080*, Revised 2002.
- Husni, Lalu. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ichsan, Slamet. 1994. *Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Tenaga Kerja*. Jakarta: PT CPI.
- International Labor Organization. 1989. *Encyclopedia of Occupational Health and Safety Vol I A-K & Vol II L-Z*. Swizerland: Geneva.
- J.Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Mondy dan Noe. 2005. *Human Resource Management*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saksono, Slamet. 1998. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius
- Setyawan Salam, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Suma'mur. 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- _____2001. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sutrisno. 2007. *Prosedur Keamanan, Keselamatan, & Kesehatan Kerja*. Sukabumi: Yudhistira
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____ 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Perca.
- Skripsi / Jurnal :**
- Anugerah, M. Fajar. 2013. *Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012)*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Darussalam. 2013. *Upaya Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Oleh Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2011-2012*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Marliza, Netalia. 2012. *Usaha-Usaha Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2011*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Tambusai, M. 2002. *Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja Dalam Kumpulan Makalah Seminar K3 RS Persahabatan Tahun*

2000 & 2001. Jakarta:
Universitas Indonesia.

2. Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Peranan dan Tindakan Nyata
Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pelayanan, Penempatan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan
Provinsi Riau.

3. Sumber Lainnya :

www.rri.co.id

www.pekanbaru.go.id

www.seputarriau.com

www.riaubisnis.com

www.presidentri.go.id

www.jpnn.com

www.beritawajib.blogspot.com

www.prokum.esdm.go.id

www.bpjsketenagakerjaan.go.id